



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.01-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 56/SDM.09-BA/1807/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Rapat Pleno Rutin;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Kerja, yang terbagi menjadi :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Pengawas;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kegiatan untuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
2. Melakukan Kegiatan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
3. Menyiapkan serta melaksanakan berbagai sarana pendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
4. Mengadakan pertemuan rutin Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sekurang-kurangnya 1(satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; dan
5. Menyampaikan laporan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah minimal satu kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan penilaian secara rutin terhadap pelaksanaan Zona Integritas, serta memberikan arahan agar kegiatan tetap berjalan konsisten, terarah sesuai Road Map, dan berkesinambungan;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur secara tertulis, berkala, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Mendorong perubahan pola pikir serta budaya kerja positif di lingkungan instansi;
- 3) Melakukan kajian terhadap potensi risiko kegagalan yang mungkin terjadi akibat adanya penolakan terhadap perubahan;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh anggota organisasi terkait Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap proses pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dilaksanakan dengan baik;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemantauan serta penilaian terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan instansi.

c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan kedisiplinan aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Mendorong peningkatan profesionalisme pegawai;
- 3) Menetapkan target dan penilaian kinerja individu;
- 4) Menegakkan penerapan disiplin dan kode etik pegawai secara konsisten; dan
- 5) Menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

d. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan mutu layanan publik agar cepat, efisien, dan mudah diakses;
 - 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPU;
 - 3) Menumbuhkan budaya pelayanan prima melalui pelatihan, inovasi, dan evaluasi;
 - 4) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan membuka hasil secara transparan; dan
 - 5) Melaksanakan perbaikan layanan secara terus-menerus.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan efektivitas dan tanggung jawab kerja KPU Lampung Timur;
 - 2) Menyusun rencana strategis bersama pimpinan secara partisipatif;
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap hasil kinerja; dan
 - 4) Memperbarui data kinerja secara berkala melalui sistem digital (E-MONEY).
- f. Tim Penguatan Pengawas, bertugas:
- 1) Menyelenggarakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran pengawasan;
 - 2) Mewujudkan zona integritas di lingkungan KPU; dan
 - 3) Berkoordinasi dengan inspektorat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Dedi Maryanto	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
2	M Wahid Setio Budi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
3	Muhamad Iqbal TM	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
4	Nurdin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
5	Ryantito Jefry Adhitama	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur	Pengarah
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Wynda Titra Agustina	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur	Koordinator
2	Resdianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

3	Manzully Arwan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4	Zaina Purnama Sari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Budiyanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Resdianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	Zaina Purnama Sari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Hari Saputra	Pelaksana	Anggota
4	Eny Pujiastuti	Pelaksana	Anggota
5	Mega Sopiandi	Pelaksana	Anggota
6	Sulistia Dewi	Pelaksana	Anggota
III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Manzully Arwan	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator
2	Zainal Muttaqin	Pelaksana	Anggota
3	Citra Mutiara Ayu	Fungsional	Anggota
4	M. Azam Munasir	Pelaksana	Anggota

5	Lisa Muliya	Pelaksana	Anggota
IV. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Budiyanto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Rusmawan Abdullah Sani	Pelaksana	Anggota
3	Eny Pujiastuti	Pelaksana	Anggota
4	Revita Setianingsih	Pelaksana	Anggota
5	Dewi Marsela	Pelaksana	Anggota
6	Zaini	Pelaksana	Anggota
7	Handoko Bimawidjaya	Pelaksana	Anggota
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Zaina Purnama Sari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Ivan Arief Imansyah	Pelaksana	Anggota
3	Sulistia Dewi	Fungsional	Anggota
4	M. Dupan Desradha. E	Pelaksana	Anggota
5	Ihsan Trapsilo	Pelaksana	Anggota
VI. TIM PENGUATAN PENGAWAS			

1	Resdianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	Aldy R Rimbawan	Pelaksana	Anggota
3	Devi Ramadhia Fitri	Pelaksana	Anggota
4	Alma Depa Yanti	Pelaksana	Anggota
5	Mega Sopiandi	Pelaksana	Anggota
6	Navia Yufitasari	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina